

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aditya, Zaka. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia)*. PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Aditya, Zaka Firma, Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia*. 2023.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. *Pradigma Rasional dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory Of Law Hans Kelsen*. Genta Publishing, 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Penerbit Nusa Media, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Penerbit Nusa Media, 2010.
- Laksito, Joni, dan Dra Dyah Listyarini. *Hukum Perizinan*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, 2015.

### Jurnal Artikel

- Arif, Mhd. Fakhrurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 56–57.
- Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, dan Tiara Ananda. "Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 270. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>.
- Djauzie, Muhammad. "Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif." *Jurnal Hukum Tora* 11, no. 1 (2025): 242.
- Fanggi, Prandy. "Analisis Konseptual Stufenbau Theory terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2025): 315.
- Faturohman, Yus Safarudin, dan Yayan. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 59.

- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, dan Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2 (2025).
- Hakim, Habib Luqman. "Hak Kebebasan Ekspresi Beragama dalam Dinamika Hukum dan Politik di Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): 100.
- Iskandar, Shinta Sudrajat, Ryan Putra, Hamdan Purnama, Muhammad Ridho, dan Diah Nurafifah. "Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 07, no. 01 (2025): 52.
- Jusuf, Muhammad, dan Adara Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 7.
- Krismanko, Surajiman. "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat)." *Journal of Islamic and Law Studies* 6, no. 1 (2022): 56.
- Mandasari, Zayanti. "AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 84–85.
- Maula, Bani Syarif. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 254.
- Mendrofa, Otniel. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 32.
- Muharam, Ricky. "Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (Creating Religion Tolerance in Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 269–70.
- Nainggolan, Yossa A. P. "Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum." *Jurnal HAM* 6 (2010): 72–77.
- Nugraha, Harry Setya. "Anomali Hubungan Pusat dan Daerah dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." *Jurnal de Jure* 13, no. 2 (2021).
- Pratama, Gilang, dan Lewiandy. "Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 3 (2024): 368. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>.

- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 15.
- Putri, Nur Talita Prapta, dan Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 15.
- Rahardi, Andriyan, Wahidul Halim, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Analisis Yuridis Syarat Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Perspektif Hak Atas Beragama." *Jurnal Batavia: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 305.
- Rahayu, Yunda, Rizqia Aufa, dan Syifa Rohima. "Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 05, no. 02 (2023): 98.
- Rahayuningtyas, Monita, Esti Ningrum, Haris Kusumawardana, dan Wahyu Hariadi. "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 2 (2023): 32.
- Rellang, A, Kamilah, dan Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024).
- Rikardo, Ofis, Silvi Purwadini, dan Sekar Maharany. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 168. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>.
- Rizki, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 4. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.
- Salsabila, Berliana, Nadia, Aulia Putri, dan Pathun Ni'mah. "Evolusi Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Indonesia: dari IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 02, no. 02 (2025): 1035.
- Sari, Hikma Dian. *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. 2022, 2. <https://doi.org/10.31219/osf.io/42r3b>.
- Siringoringo, Martin. "Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 sebagai Hukum

Dasar Negara.” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 03, no. 01 (2022): 112.

Situngkir, Roman. “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Ius Studia Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 665.

Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 542.

Sunarno, Ali, Firman, Asep Ikbil, dan Lala Indrawati. “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial pada Masyarakat Multikultural di Kalimantan Tengah.” *Jurnal Paris Langkis* 3, no. 2 (2023): 94.

Tsabitah, Talitha, Clifford Saputra, dan Gilang Saputra. “Analisis Peran Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban Asasi Manusia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

Widelia, Hadasa. “Tanggung Jawab Sosial Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Ibadah Kristen di Indonesia.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1357.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

### **Skripsi**

Arnan, Muhammad. “Analisis Wacana ‘Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia’ pada Podcast Habib Husein Ja’far Al-HADAR.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Pratama, Wulandari. “Analisis Pembangunan Fasilitas Umum Kabupaten Karimun (Studi Kasus pada Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang di Jl. Ahmad Yani Tanjung Balai Karimun).” Thesis (S1), Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022.

Ritoyo, Juvan Ariefandi. “Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Persetujun Bangunan Gedung di Kota Semarang.” Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2024.

### **Diktat**

Sugianto, Bambang. *Hukum Pemerintah Daerah (Diktat)*. 2022.

## Website

- Admin DPMPTSP. "Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)." *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, 2021. <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/2021/11/01/penyelenggaraan-penerbitan-persetujuan-bangunan-gedung-pbg-dan-sertifikat-laik-fungsi-slf-melalui-sistem-informasi-manajemen-bangunan-gedung-simbg/>.
- Admin Putr. "Implementasi SIMBG dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung." *Putr.buleleng.go.id*, 2024. [https://putr.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/23\\_implementasi-simbg-dalam-penyelenggaraan-bangunan-gedung](https://putr.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/23_implementasi-simbg-dalam-penyelenggaraan-bangunan-gedung).
- AdminPBG. "Perbedaan PBG dan SLF." *konsultanpbgslf.com*, t.t. Diakses 22 Januari 2026. <https://konsultanpbgslf.com/perbedaan-pbg-dan-slf/>.
- Adryamarthanino, Verelladevanka, dan Nibras Nailufar. "Konflik Poso: Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaian." *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/100000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian?page=1>.
- Amindoni, Ayomi. "Pembangunan Gereja di Tanjung Balai Karimun Ditolak Warga Meski Sudah Kantongi IMB, Mengapa Aksi Intoleransi Terus Terjadi?" *BBC News Indonesia*, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>.
- Anonim. "Teori Hukum Stufenbau." *Hukum Expert*, 2021. <https://hukumexpert.com/teori-hukum-stufenbau/?detail=ulasan>.
- Ashfiya, Dilla. "Kasus Intoleransi di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku dan Contohnya." *GoodStats*, 2025. <https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesia-HdiJw>.
- Auli, Renata. "Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/>.
- Auli, Renata Christha. "Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/>.
- Humas. "Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai dengan Aturan dan Perundang-undangan yang Berlaku." *kepri.kemenag.go.id*, 2023.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku>.

Humas Kemenkum Jogja. “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan adalah Hak Fundamental yang Diakui Oleh Undang-Undang Dasar 1945.” *Kanwil Kementerian Hukum RI Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta), 2024. <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-adalah-hak-fundamental-yang-diakui-oleh-undang-undang-dasar-1945>.

Inmas. “Profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karimun.” *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri* (Karimun), 2019. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/profil-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub-kabupaten-karimun->.

Isabela, Monica Ayu Caesar, dan Nibras Nada Nailufar. “Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM.” *Kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->.

Kabar Harian. “Menilik 4 Instrumen HAM yang Ada di Indonesia.” *kumparan.com*, 2021. <https://kumparan.com/kabar-harian/menilik-4-instrumen-ham-yang-ada-di-indonesia-1x1c6Me8Ylj/full>.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Nifasri. “Sebelum di PTUN, Pemerintah Sudah Fasilitasi Masalah Renovasi Gereja Karimun.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2020. <https://kemenag.go.id/nasional/sebelum-di-ptun-pemerintah-sudah-fasilitasi-masalah-renovasi-gereja-karimun-51zpy5>.

Munawaroh, Nafiatul. “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya.” *Hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>.

Nugraha, Muhammad. “Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya.” *hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/>.

Nugraha, Muhammad Raihan. “Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya.” *Hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/>.

Pasaribu, Christina. “Masalah Teknis Penerbitan PBG: Solusi Cepat & Praktis Untuk Izin Bangunan.” *pbg.co.id*, 2025. <https://pbg.co.id/blog/masalah-teknis-penerbitan-pbg-solusi-cepat-praktis-untuk-izin-bangunan/>.

“Petunjuk Teknis/Tutorial Aplikasi SIMBG.”  
<https://simbg.pu.go.id/publikasi/petunjuk-teknis>.

Pramosinto, Sandi. “PUPR Karimun Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas PBG hingga Pelayanan.” *Batam Pos*, 2025.  
<https://batampos.co.id/2025/08/24/pupr-karimun-gelar-forum-konsultasi-publik-bahas-pbg-hingga-pelayanan/>.

Redaksi. “Gereja Bethel Indonesia di Kundur Layak dibangun, Polemik Perizinan Telah Usai.” *samuderakepri.co.id*, 2025.  
<https://www.samuderakepri.co.id/gereja-bethel-indonesia-di-kundur-layak-dibangun-polemik-perizinan-telah-usai/>.

Santo. “Perbedaan Pemerintah Daerah dan Kota.” *pemerintahan.uma.ac.id*, 2023.  
<https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/10/perbedaan-pemerintahan-daerah-dan-kota/>.

Tim Hukumonline. “3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya.” *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/?page=2>.

T.t. <https://simbg.pu.go.id/>.

T.t. <https://dpmpptsp.karimunkab.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Persetujuan-Bangunan-Gedung-PBG.pdf>.

<https://simbg.pu.go.id/lacak?nomor=210205-13022025-002>.